

**PENGARUH TRANSPARANSI, ASIMETRI INFORMASI, DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT TERHADAP POTENSI KECURANGAN DANA DESA  
(Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**Oleh:**

**DELVIRA EKA SELVIA  
NIM 2018/18043014**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2022**



**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENGARUH TRANSPARANSI, ASIMETRI INFORMASI, DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT TERHADAP POTENSI KECURANGAN DANA DESA  
(Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan)**

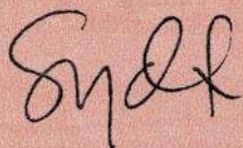
Nama : Delvira Eka Selvia  
NIM / TM : 18043014 / 2018  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2022

Disetujui Oleh

Ketua Departemen Akuntansi

Pembimbing



Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D

NIP. 19800103 200212 2 001



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

NIP. 19730213 199903 1 003



## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

**Judul** : Pengaruh Transparansi, Asimetri Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan)

**Nama** : Delvira Eka Selvia

**NIM / TM** : 18043014 / 2018

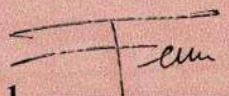
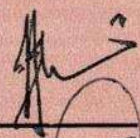
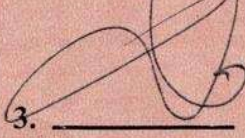
**Program Studi** : Akuntansi

**Keahlian** : Akuntansi Sektor Publik

**Fakultas** : Ekonomi

Padang, November 2022

### Tim Penguji,

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	1. 
2	Anggota	Herlina Helmy, SE, M.SAk	2. 
3	Anggota	Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak	3. 



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Delvira Eka Selvia  
NIM/Tahun Masuk : 18043014/2018  
Tempat/Tgl. Lahir : Painan/ 02 September 1999  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Padang Tae, Kec. Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan  
No. HP/Telp : 082388934662  
Judul Skripsi : Pengaruh Transparansi, Asimetri Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, November 2022  
Saya yang Menyatakan



Delvira Eka Selvia  
18043014/2018

## ABSTRAK

**Selvia, Delvira Eka ((18043014/2018). “Pengaruh Transparansi, Asimetri Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan)”. Skripsi. Padang: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.**

**Dosen Pembimbing: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, asimetri informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap potensi kecurangan dana desa. Penelitian ini termasuk kategori kausalitas. Populasi penelitian ini adalah 12 Nagari di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Jenis penelitian ini adalah total sampling dan sampel penelitian ini menjadikan seluruh populasi sebagai sampel. Untuk sumber data yang digunakan berupa data primer. Data dikumpulkan melalui kuesioner. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Transparansi tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa. (2) Asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap potensi kecurangan dana desa. (3) Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa.

**Kata Kunci: Transparansi, Asimetri Informasi, Partisipasi Masyarakat, Potensi Kecurangan, Dana Desa**

## *ABSTRACT*

**Selvia, Delvira Eka ((18043014/2018). “Pengaruh Transparansi, Asimetri Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan)”. Skripsi. Padang: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.**

**Dosen Pembimbing: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**

This research aims to examine the effects of transparency, information asymmetry, and community participation on the potential for fraud in village funds. The research includes the category of causality. The population of this research is 12 Nagari in Sutera subdistrict, Pesisir Selatan regency. This study type is total sampling and the sample of this research makes all the population as samples. For the data source used is in the form of primary data. Data collected through questionnaires. The results obtained from this study are (1) Transparency has no effect on the potential for fraud in village funds. (2) Information asymmetry has a positive and significant effect on the potential for fraud in village funds. (3) Community participation does not effect the potential for fraud in village funds.

***Keywords: Transparency, Information Asymmetry, Community Participation, Potential for Fraud, Village Funds***

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'amin, penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Transparansi, Asimetri Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan)” dengan baik sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang beserta jajaran yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Sany Dwita, SE, Ak, M. Si, Ph. D selaku Ketua Departemen Akuntansi dan Ibu Vita Fitria Sari, SE, M. Si selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
4. Ibu Ade Elsa Betavia, SE, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberi semangat dukungan kepada penulis selama periode studi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Herlina Helmy, SE, M.SAk selaku dosen penguji pertama dan Ibu Dr.

Deviani, SE, M.Si, Ak selaku dosen penguji kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk menguji serta memberikan arahan perbaikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan dan motivasi yang bermanfaat selama penulis menempuh bangku pengkuliah.
7. Orang tua dan keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada sahabat seperjuangan sejak awal perkuliaan penulis (Upiek Dila), yang selalu ada memberikan dukungan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang banyak memberikan dukungan moral.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan Hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah banyak membantu. Semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penulisan skripsi yang lebih baik.

Padang, November 2022

Delvira Eka Selvia



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II KERANGKA TEORI ATAU KAJIAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Kajian Teori .....	13
1. Teori Keagenan (Agency Theory) .....	13
2. Potensi Kecurangan (Fraud) .....	16
3. Dana Desa .....	22
4. Transparansi.....	29
5. Asimetri Informasi.....	34
6. Partisipasi Masyarakat .....	37
B. Penelitian Terdahulu .....	40
C. Kerangka Konseptual .....	43
D. Hipotesis Penelitian.....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Populasi Dan Sampel Penelitian .....	53
C. Jenis dan Sumber Data .....	55
D. Metode Pengumpulan Data.....	56
E. Variabel Penelitian .....	56
F. Instrumen Penelitian.....	57
G. Uji Kualitas Data.....	58
H. Uji Asumsi Klasik .....	59
I. Teknik Analisis Data.....	60
J. Definisi Operasional.....	64

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	66
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	66
B. Demografi Responden.....	67
C. Uji Kualitas Data.....	71
1. Uji Validitas.....	71
2. Uji Reliabilitas .....	72
D. Uji Asumsi Klasik.....	73
1. Uji Multikolinearitas.....	73
2. Uji Normalitas.....	74
3. Uji Heteroskedastisitas .....	75
E. Teknik Analisis Data.....	76
1. Analisis Hasil Deskriptif.....	76
2. Hasil Analisis Data .....	82
a. Uji Regresi Berganda .....	82
b. Uji Model.....	84
a). Uji Koefesien Determinasi ( $R^2$ ) .....	84
b). Uji F ( <i>F-test</i> ).....	85
c). Uji Hipotesis ( <i>t-test</i> ).....	86
F. PEMBAHASAN .....	87
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	95
A. Kesimpulan .....	95
B. Keterbatasan Penelitian.....	95
C. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	97
<b>LAMPIRAN</b> .....	103



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	57
Tabel 2 Penyebaran dan Pengambilan Kuesioner .....	66
Tabel 3 Jumlah Responden Berdasarkan Jabatan .....	67
Tabel 4 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	68
Tabel 5 Jumlah Responden Berdasarkan Usia.....	69
Tabel 6 Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	69
Tabel 7 Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	70
Tabel 8 Uji Validitas .....	71
Tabel 9 Uji Reliabilitas .....	72
Tabel 10 Uji Multikolinearitas .....	73
Tabel 11 Uji Normalitas .....	74
Tabel 12 Uji Heteroskedastisitas.....	75
Tabel 13 Distribusi Frekuensi Variabel Potensi Kecurangan .....	76
Tabel 14 Distribusi Frekuensi Variabel Transparansi.....	78
Tabel 15 Distribusi Frekuensi Variabel Asimetri Informasi.....	79
Tabel 16 Distribusi Frekuensi Variabel Partisipasi Masyarakat .....	81
Tabel 17 Uji Regresi Berganda .....	83
Tabel 18 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	84
Tabel 19 Uji F .....	85

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Konseptual.....	44
------------------------------------	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kecurangan dalam bidang akuntansi sudah sering terjadi di Indonesia, baik itu di sektor swasta maupun di sektor pemerintah. Secara sederhana kata kecurangan (fraud) yang berarti bentuk penipuan yang disengaja sehingga akan mengakibatkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut serta memberikan keuntungan bagi pelaku yang melakukan kecurangan (Anastasia, 2014). Menurut Tuanakotta (2013) kecurangan merupakan upaya penipuan yang disengaja, oleh satu atau lebih anggota manajemen, atau pengelola, karyawan, atau pihak ketiga, melalui tindakan penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah atau melawan hukum.

Kecurangan dana desa masih menjadi persoalan yang menyita perhatian utama masyarakat dan pemerintahan. Sejak awal dialokasikannya dana desa, anggaran dana desa selalu mengalami kenaikan. Dari data Kementerian Keuangan Republik Indonesia setiap tahun menganggarkan dana desa yang cukup besar oleh pemerintah pusat untuk diberikan kepada desa, sehingga menjadi perhatian bagi semua pihak. Pada tahun 2015, anggaran untuk dana desa adalah sebesar Rp. 20,8 triliun, tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi Rp. 46,7 triliun, tahun 2017 naik lagi sebesar Rp. 59,8 triliun. Pada tahun 2018 sebesar Rp. 59,9 triliun, dan pada tahun 2019 naik menjadi Rp. 69,8 triliun, kemudian pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 71,2 triliun, dan tahun 2021 menjadi 72,0 triliun (Kemenkeu, n.d.).

Pemberian alokasi dana desa yang besar memiliki potensi untuk terjadinya kecurangan dana desa yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya yang telah dipercaya oleh masyarakat (Jayanti dan Suardana, 2019). Menurut Nurjanah & Setiawan (2021) kecurangan yang timbul kedepannya harus menjadi perhatian serta pembahasan yang serius. Dilihat dari banyaknya kasus kecurangan yang sudah banyak terjadi seperti tindakan korupsi yang melibatkan berbagai pejabat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tindakan korupsi yang sering terjadi adalah dalam bentuk manipulasi pencatatan, penghilangan dokumen dan laporan keuangan yang tidak mengikuti standar.

Menurut Association of Certified Fraud Examinations (ACFE) dalam Tunggal (2010) kecurangan dibagi dalam 3 bentuk yaitu, Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud), Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation), dan Korupsi (Corruption). Pada umumnya bentuk kecurangan akuntansi yang banyak dilakukan yaitu berkaitan dengan korupsi. Korupsi muncul di negara berkembang, karena mereka berlomba-lomba dalam memenuhi gaya hidup yang konsumtif, sifat yang tidak pernah puas, penegak hukum yang lemah, serta rendahnya tingkat kesadaran akan moral atau perilaku yang baik. Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesian Corruption Watch (ICW)* kasus korupsi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sejak tahun 2015 hingga 2020, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. Pada perangkat desa mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 111 miliar (Guritno, 2021).

Dalam Redaksi, (2021) permasalahan kasus korupsi tersebut juga terjadi



di beberapa desa di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu terutama yang dikemukakan oleh penyidik Pidsus (Pidana Khusus) Kejari Pesisir Selatan, resmi menahan Wali Nagari Taratak, Kecamatan Sutera sejak Rabu, 13 Januari 2021. Penahanan dilakukan setelah penyidik dari Kejari Pessel memeriksa tersangka kasus korupsi dana desa tahun 2019. Tersangka terbukti melakukan perbuatan yang merugikan keuangan Negara sekitar Rp. 250 juta. Kasus korupsi yang disangkakan terkait dugaan penyalahgunaan ADD dan DD tahun 2019 tentang pembangunan jalan Pinang Baliria. Sebelum ditetapkan menjadi tersangka, tim penyidik Pidsus Kejari Pessel telah melakukan penyelidikan terhadap penggunaan ADD dan DD yang dikelola Nagari Taratak tahun 2019, yaitu anggarannya kurang lebih Rp. 464 juta, tim penyidik tersebut menemukan banyak keganjalan atau tidak sesuai spesifikasi, yang terungkap dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), proses penyidikan masih berlanjut sampai perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Kecamatan Sutera merupakan salah satu dari desanya penyumbang kasus kecurangan. Berdasarkan wawancara di Kecamatan Sutera, menjelaskan bahwa rata-rata pendidikan pegawai perangkat desa disana adalah SMA/ sederajat. Hal ini juga memungkinkan ketidakmampuan mengelola keuangan disana. Menurut Kusuma et al (2021) potensi kecurangan disebabkan kelalaian yang tidak sadar dilakukan oleh aparatur desa yang berdampak merugikan pihak lain, dan tekanan yang dirasakan dari keharusan melakukan sesuatu.

Dana desa di Kecamatan Sutera juga mengalami kenaikan ADD dan DD (berita.pesisirselatankab, 2020). Namun adanya peningkatan dana desa ini tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah kegiatan di Kecamatan Sutera. Berdasarkan

Permenkeu No 199 jumlah kegiatan ini merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah desa untuk memajukan desa. Berdasarkan laporan perkembangan anggaran di tahun 2017, jumlah kegiatan di Kecamatan Sutera sebesar 24 kegiatan sedangkan pada tahun 2020 jumlah kegiatan malah menurun menjadi 21 kegiatan. Seharusnya peningkatan jumlah dana desa ini pun harus dibarengi peningkatan jumlah kegiatan dan juga terlampauinya target dan total capaian mereka. Dapat disimpulkan Kecamatan Sutera merupakan kecamatan penerima dana desa terbesar tetapi tidak didukung oleh pengembangan jumlah kegiatan disana. Hal ini menjadikan Kecamatan Sutera sangat berpotensi atau cenderung akan melakukan suatu fraud.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan kecurangan, berdasarkan penelitian terdahulu yang menjelaskan faktor yang mempengaruhi kecurangan dana desa yaitu: Penelitian Farida et al (2021) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa. Penelitian Parra et al (2021) yang memperoleh hasil bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan dalam mengurangi yang berkaitan dengan korupsi. Penelitian Mulyanto et al (2021) menjelaskan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan dana desa. Penelitian Adwitya & Sari (2020) menjelaskan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dan hasil yang sama juga dilakukan oleh Komala et al (2019) dan Wilipo (2006) serta mustikasari (2013), yang menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan. Dan penelitian Kisnawati et al (2019), partisipasi masyarakat yang dilihat dari

aspek perencanaan dan pelaksanaan sangat berperan dalam mengurangi kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa.

Kecurangan yang terjadi di instansi pemerintah dapat menerapkan transparansi untuk menurunkan potensi kecurangan dana desa. Dimana terdapat dalam penelitian Farida et al (2021) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa. Transparansi telah menjadi kewajiban bagi setiap badan publik, termasuk pemerintah desa setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, secara tegas dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada prinsip transparansi (keterbukaan). Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Perangkat desa harus transparan dalam pengelolaan dana desa karena transparansi akan mendorong berkurang terjadinya kecurangan dana desa. Transparansi dimaksudkan agar aparat desa bertindak sesuai dengan aturan hukum dan etika yang berlaku, atau transparansi dilakukan untuk memberikan penjelasan maupun pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai program dan kebijakan yang telah dilakukan atau sedang dilakukan beserta sumber daya yang digunakan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya mudah diakses atau diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah guna menghindari terjadinya kecurangan dana desa (Novatiani et al,

2019). Menurut Rusman (2022), di kantor Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih, Kecamatan Sutera ditemukan tidak adanya papan informasi penggunaan APBNagari tahun 2022, dimana pemerintah desa wajib memasang dan publikasi anggaran DD dan ADD sebagai bentuk transparansi publik, sebagaimana diatur dalam UU no.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada Bab 2 pasal 2 ayat disebutkan bahwasannya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

Dalam UU No 14 tahun 2008 disebutkan informasi mengenai pengelolaan keuangan harus wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, baik dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga laporan keuangannya. Sebagaimana juga tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014 bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Dengan ketersediaan informasi masyarakat dapat mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya menguntungkan salah satu kelompok masyarakat secara tidak profesional. Jadi, dalam pelaksanaan pemerintah transparansi harus menjadi hal yang utama agar tidak menimbulkan kerugian negara. Masyarakat sebagai pihak yang harus mendapatkan informasi. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemeritahan, maka akan



menjamin meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan akan dapat meminimalisir berkurangnya penyimpangan atau kecurangan.

Kecurangan dana desa dapat terjadi disebabkan oleh asimetri informasi. Menurut Mulyanto et al (2021) menjelaskan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan dana desa. Asimetri informasi yaitu ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen, ketika prinsipal tidak memiliki suatu informasi yang cukup mengenai kinerja agen, sebaliknya agen memiliki lebih banyak mempunyai informasi baik itu tentang kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan (Mulyanto et al, 2021). Jika terjadi kesenjangan informasi maka dapat membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan, dengan kata lain asimetri informasi antara atasan dan bawahan dapat mempengaruhi laporan keuangan yang bisa menimbulkan terjadinya kecurangan. Menurut Najahningrum (2013) menyatakan bahwa apabila terjadi kesenjangan informasi antara pihak pengguna dan pihak pengelola maka akan membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan. Demikian pula bila terjadi asimetri informasi, agen bisa membuat bias atau memanipulasi laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saftarini et al (2015) ditemukan hasil bahwa asimetri informasi memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan. Teori tersebut juga didukung oleh penelitian Wilipo (2006) dan mustikasari (2013) yang menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan. Artinya, semakin tinggi tingkat asimetri yang terjadi,

maka tingkat kecurangan akuntansi yang akan terjadi juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika asimetri informasi antara pihak penyedia dan pengguna rendah maka kecenderungan kecurangan akuntansi yang akan terjadi akan semakin rendah.

Kecurangan dana desa dapat menurun disebabkan partisipasi dari masyarakat. Dalam penelitian Kisnawati et al (2019), partisipasi masyarakat yang dilihat dari aspek perencanaan dan pelaksanaan sangat berperan dalam mengurangi kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa, dengan keterlibatan seluruh pihak tentu akan sangat efektif untuk menjaga dan mengawasi proses berjalannya pemerintah desa. Partisipasi masyarakat sangat penting bagi instansi pemerintah dalam pengelolaan dana desa. Partisipasi adalah seseorang dengan sadarnya terlibat dalam berinteraksi sosial dalam situasi tertentu (wazir, 1999). Sedangkan partisipasi masyarakat merupakan masyarakat terlibat dalam keikutserta pada proses pengidentifikasian permasalahan dan potensi yang ada pada masyarakat, memilih, serta mencari solusi paling alternatif dalam menangani permasalahan, melakukan upaya dalam penyelesaian permasalahan, serta terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi (Muslimin dan Nurmaeta, 2012). Adanya permasalahan kecurangan seperti korupsi, yang mana pelaku korupsi dana desa mayoritas biasanya dilakukan oleh Kepala Desa. Adanya korupsi dana desa tersebut berdampak pada tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di desa. Oleh sebab itu perlu dilakukan pencegahan korupsi dana desa, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat

desa. Masyarakat berpartisipasi pada perencanaan yang disebut musrenbang, pelaksanaan program, dan aspek kontrol atau pengawasan pelaksanaan program yang didanai dan dibiayai oleh dana desa. Bentuk partisipasi dapat berupa tenaga, pikiran, fasilitas atau peralatan dan kemampuan atau keahlian dalam bidang tertentu yang dimiliki masyarakat. Partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan selanjutnya. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal dan berpotensi terjadinya kecurangan (Dwijosusilo & Shafiyah, 2020).

Partisipasi publik sebagai nyawa dalam proses pengawasan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat akan mencegah potensi kecurangan. Adanya partisipasi dapat mendorong kelompok masyarakat terus menyuarakan hal baik dan mencegah terjadinya hal buruk. Sehingga kecurangan dana desa dapat diantisipasi seminimal mungkin. Dan dengan partisipasi lebih mudah dan efektif dalam mengantisipasi potensi pelanggaran atau kecurangan.

Berdasarkan penelusuran di atas maka didapat bahwa transparansi, asimetri informasi, dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh terhadap potensi terjadinya kecurangan dana desa. Selain itu, dengan adanya fenomena bahwa kecurangan akuntansi di desa dalam bentuk korupsi menjadi satu alasan kenapa penting dilakukannya kembali penelitian ini. Kemudian penelitian seperti ini variabel-variabelnya masih sedikit dan masih baru dilakukan karena melihat pemerhatian kepada desa juga baru dilasaknakan oleh Pemerintah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari et al,(2019) dengan judul akuntabilitas, kesesuaian kompensasi, pengendalian intern terhadap potensi kecurangan dana desa. Dimana terdapat tiga perbedaan, perbedaan pertama terletak pada variabel independen yang digunakan. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu transparansi, asimetri informasi, dan partisipasi masyarakat. Perbedaan kedua yaitu terletak pada sampel yang diambil. Dan perbedaan ketiga terletak pada objek dan waktu penelitiannya.

Berdasarkan latar belakang fenomena yang telah dijelaskan diatas, dengan ini penulis tertarik melakukan penelitian guna menguji apakah transparansi, asimetri informasi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa. Maka judul dari penelitian ini adalah : **“PENGARUH TRANSPARANSI, ASIMETRI INFORMASI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP POTENSI KECURANGAN DANA DESA”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana transparansi berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa.?
2. Sejauhmana asimetri informasi berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa.?
3. Sejauhmana partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa.?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh transparansi terhadap potensi kecurangan dana.
2. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh asimetri informasi terhadap potensi kecurangan dana desa.
3. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh partisipasi masyarakat terhadap potensi kecurangan dana desa.

### **D. Manfaat Penelitian**

Menunjuk pada hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, besar harapan penulis untuk dapat memberikan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Penulis**

Sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis mengenai pengaruh transparansi, asimetri informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap potensi kecurangan dana desa.

#### **2. Manfaat Akademis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan dan memberikan edukasi terhadap ilmu pengetahuan yang akan datang khususnya terhadap ilmu akuntansi.

### 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi tambahan untuk penelitian di masa depan, khususnya bagi yang akan melakukan penelitian kembali mengenai potensi kecurangan dana desa.